

ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

PINKAN OLIVIAN SERAF GOSAL

A011191007



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

SKRIPSI

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**PINKAN OLIVIAN SERAF GOSAL
A011191007**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

SKRIPSI

**ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**PINKAN OLIVIAN SERAF GOSAL
A011191007**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 27 Februari 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu M. A. CRP
NIP. 19590306198503002

Pembimbing II



Dr. Sri Undai Nurbayani SE, M.Si, CPF
NIP. 19660811 199103 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



SE, M.Si, CPF
40715 200212 1003

SKRIPSI

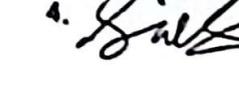
ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan
oleh:

PINKAN OLIVIAN SERAF GOSAL
A011191007

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 27 Februari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Tim penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Abd.Hamid Paddu, M.A., CRP	Ketua	1. 
2.	Dr. Sri Undal Nurbayan, SE., M.Si., CPF	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Agussalim, SE., M.Si	Anggota	3. 
4.	Salman Samir, SE., M.Sc	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin





Salman Samir, SE., M.Si., CWM
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Pinkan Olivian Seraf Gosal
Nomor Pokok : A011191007
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Februari 2024

Yang Menyatakan



Pinkan Olivian Seraf Gosal

A011191007

PRAKATA

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Kehendak-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini berjudul “Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan penuh kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga segala amal kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal yang bernilai pahala di sisi-Nya.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi, tidak terlepas dari bimbingan dan support dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih terdalam dan setinggi-tingginya kepada:

1. Penulis menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya teristimewa, teriring doa dan kasih sayang yang tiada henti atas segala cinta dan sayang yang tiada berujung, Ayahanda Stanley Gosal dan Ibunda tercinta May Ritha yang telah membesarkan, mendidik,

memotivasi, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai dengan doa-doa yang tak hentinya dipanjatkan untuk anaknya.

2. Bapak Dr. Sabir, SE., MSi., CWM®. selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriawati Djam'an, SE., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
3. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A., CRP. selaku penasihat akademik penulis. Terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis selama berproses di bangku perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, M.A., CRP selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF selaku pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi. terimakasih untuk setiap kritik, saran serta kesabaran dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Agussalim, SE., M.Si dan Salman Samir, SE., M.Sc. selaku penguji yang telah memberikan kritik saran guna perbaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan tingkah laku yang kurang berkenan selama ini, baik saat perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen FEB-UH, khususnya Program Ilmu Ekonomi, yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik kepada penulis selama menempuh Pendidikan
7. Para staff pegawai FEB-UH yang telah membantu penulis dalam proses administrasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
8. Untuk 7 Icons terima kasih atas segala bantuan, doa, dukungan dan semangat

yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk Ilmu Ekonomi 2019 “Griffins” teman seperjuangan terima kasih atas segala bantuan, saran, motivasi, nasihat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk keluarga besar HIMAJIE FEB-UH, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat belajar dan berproses, serta terimakasih atas pengalaman – pengalaman berkesan yang telah diberikan.

Demikianlah, semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi semoga Tuhan YME memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, Aamiinn.

ABSTRAK

Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Pinkan Olivian Seraf Gosal

Abd Hamid Paddu

Sri Undai Nurbayani

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan proses pembangunan ekonomi yang belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian perlu adanya analisis terkait apa saja faktor penyebab kemiskinan di Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menganalisis PDRB, IPM, Investasi dan TPT terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004-2022. Penelitian ini menggunakan data *time series* dengan jangka waktu 19 tahun. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan, IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan, Investasi berpengaruh negative tidak signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sedangkan, TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Sulawesi Selatan.

Kata kunci: *Kemiskinan, PDRB, IPM, Investasi, TPT.*

ABSTRACT

Analysis Of The Determinants Of Poverty In The Province Of South Sulawesi

Pinkan Olivian Seraf Gosal

Abd Hamid Paddu

Sri Undai Nurbayani

South Sulawesi is one of the provinces in Indonesia that cannot be separated from the problem of poverty. The high poverty rate in South Sulawesi Province shows that the economic development process has not been able to improve the welfare of the community evenly. Thus, it is necessary to analyze the factors that cause poverty in South Sulawesi. This study aims to determine the factors that can affect the poverty rate. This study analyzes GRDP, HDI, Investment and TPT on the poverty rate in South Sulawesi Province in 2004-2022. This research uses time series data with a period of 19 years. The analysis model used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that partially GRDP has a negative and significant effect on poverty in South Sulawesi, HDI has a significant negative effect on poverty in South Sulawesi, Investment has a negative and insignificant effect on poverty in South Sulawesi. Meanwhile, TPT has a positive and significant effect on poverty in South Sulawesi.

Keywords: *Poverty, GDP, HDI, Investment, Open Unemployment Rate*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	8
1.3 Tujuan penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan teori.....	11
2.1.1 Kemiskinan.....	11
2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.1.4 Investasi	17
2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	22
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	21
2.2.1 Hubungan PDRB dengan Kemiskinan.....	21
2.2.2 Hubungan IPM dengan Kemiskinan	22
2.2.3 Hubungan antara Investasi dan Kemiskinan.....	23
2.2.4 Hubungan TPT dengan Kemiskinan.....	23
2.3 Studi empiris.....	23
2.4 Kerangka berpikir	26
2.5 Hipotesis Penelitian	27

BAB III.....	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Ruang lingkup penelitian.....	28
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.3 Metode Analisis Penelitian	28
3.3.1 Uji asumsi klasik	30
3.3.2 Uji hipotesis	31
3.4 Definisi Operasional Variabel	31
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Perkembangan Variabel Penelitian.....	33
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	39
4.3 Hasil Estimasi Regresi.....	42
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	43
BAB V	48
KESIMPULAN DAN SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	1
Gambar 1.2 PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	2
Gambar 1.3 IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	3
Gambar 1.4 Realisasi Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021. 5	
Gambar 1.5 TPT di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	24
Gambar 4.1 Presentasi Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2022	1
Gambar 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2022	2
Gambar 1.3 IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2022	3
Gambar 1.4 Realisasi Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004- 2022. 5	
Gambar 1.5 Presentasi TPT di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2022	6

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Multikolinearitas.....	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	40
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas	41
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi.....	41
Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Regresi	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

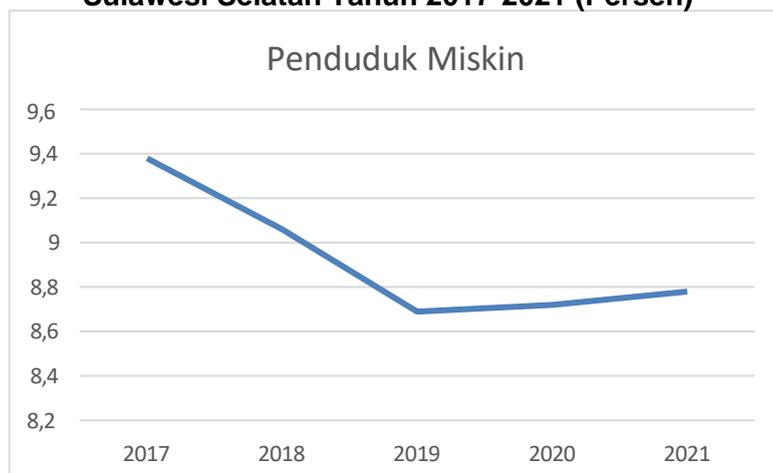
Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu menjadi perbincangan permasalahan di suatu negara, salah satunya adalah negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Menurut BPS Kemiskinan adalah ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin apabila mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Menurut M. Nasir (2008) permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi. Dalam hal ini upaya yang dapat dilakukan dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilakukan secara terpadu.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Melihat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah melakukan beberapa upaya strategis untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan. Namun upaya tersebut belum mampu memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan data BPS terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka kemiskinan pada periode 2017 hingga 2021 tidak selalu mengalami penurunan namun berfluktuasi. Terlihat pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka kemiskinan sebesar 9,38 persen dan menurun menjadi 9,06 persen pada tahun 2018, kemudian terus menurun menjadi 8,69 persen pada tahun 2019, dan meningkat sebesar 8,72 persen pada tahun 2020 maka pada tahun 2021 terus berlanjut. bertambah 8,78 persen.

Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

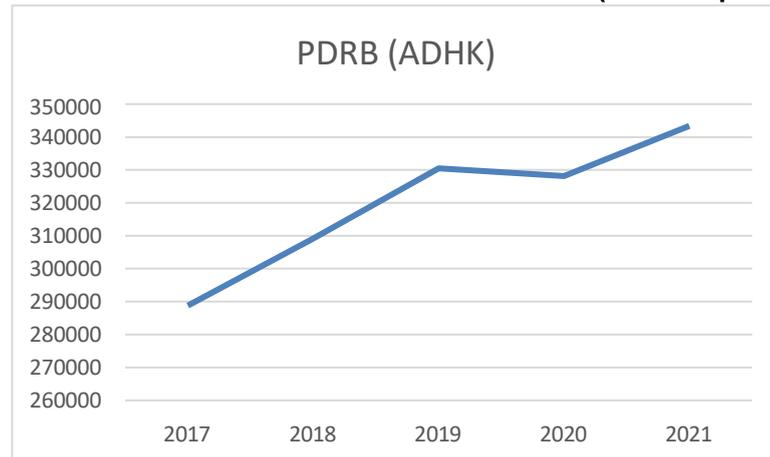
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perekonomian suatu daerah. Menurut Rahman & Chamelia (2015) salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah atau provinsi pada suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB. Nilai PDRB akan menjelaskan bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola atau menggunakan sumber daya yang ada. Selain itu, tingkat perekonomian atau kesejahteraan suatu daerah juga dapat dilihat dari besarnya belanja daerah.

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Sehingga arah perekonomian daerah semakin jelas. Berikut data PDRB tahunan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2021.

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2017-2021 produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai PDRB sebesar 286,65 triliun rupiah dan

terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 328,66 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,66 persen menjadi 326,38 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 341,38 triliun rupiah.

Gambar 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

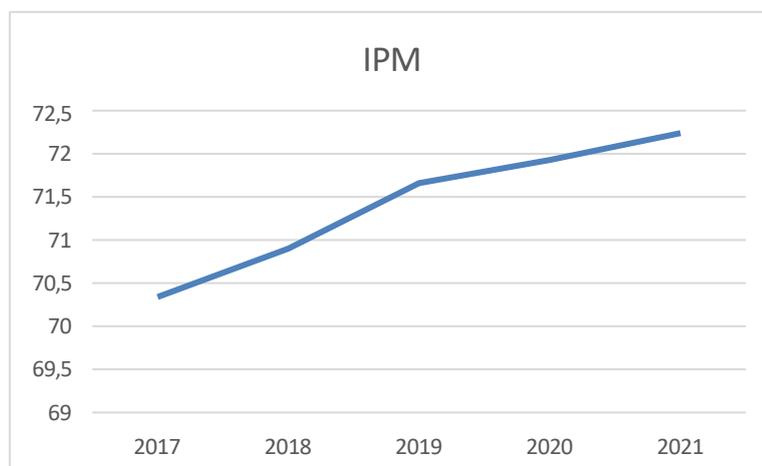
Faktor lain yang mempengaruhi angka kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik (2007), Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pencapaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen fundamental kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia mengukur pencapaian pembangunan manusia terhadap beberapa komponen mendasar kualitas hidup. Untuk mengukur kualitas hidup, IPM diukur melalui tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak.

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat. Produktivitas yang rendah berdampak pada rendahnya pendapatan, sehingga menimbulkan banyak penduduk miskin. Namun jika IPM meningkat diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan di suatu daerah.

Berdasarkan data di atas pada Gambar 1.3 terlihat bahwa indeks

pembangunan manusia terus meningkat dari tahun 2017-2021. IPM pada tahun 2017 sebesar 70,34%, terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 70,90% dan terjadi peningkatan sebesar 71,66% pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 meningkat sebesar 71,93%, pada tahun 2021 terjadi peningkatan tertinggi sebesar 72,24%.

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi berperan dalam mengurangi atau menekan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Investasi merupakan fungsi pembentukan modal dan penyerapan tenaga kerja. Pembentukan modal dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang akan meningkatkan pendapatan nasional atau menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan banyaknya lapangan kerja tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berfungsi untuk menekan atau menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) investasi diartikan sebagai kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi (produksi) dengan harapan memperoleh keuntungan (benefit) di masa yang akan datang. Pada prinsipnya investasi dibedakan menjadi "investasi finansial" dan "investasi non finansial". Investasi finansial lebih ditujukan pada investasi dalam bentuk kepemilikan

instrumen keuangan seperti uang tunai, tabungan, deposito, modal dan penyertaan, surat berharga, obligasi dan sejenisnya, sedangkan investasi non finansial diwujudkan dalam bentuk investasi fisik (investasi riil) berupa “modal” atau barang modal, termasuk persediaan. Meski begitu, investasi finansial pada waktunya juga bisa diwujudkan menjadi investasi fisik.

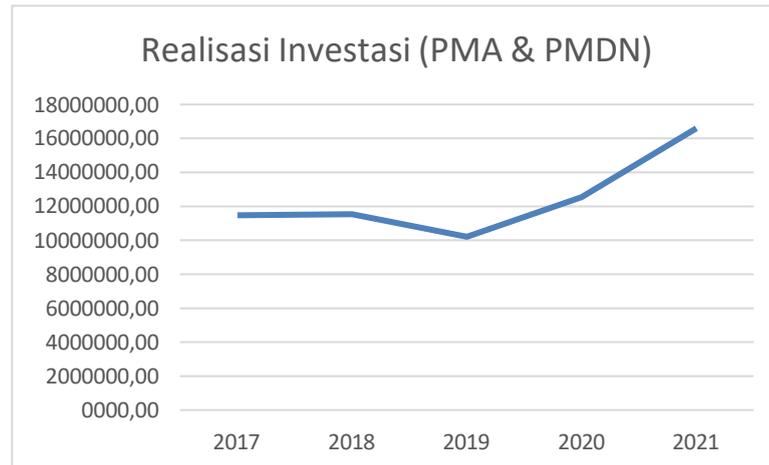
Bentuk penanaman modal secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah/swasta yang disebut PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan penanaman modal oleh pihak asing yang disebut (Penanaman Modal Asing). Dengan adanya investasi maka kapasitas dalam produksi akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Peningkatan output akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Investasi dan pembangunan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan dan tanpa investasi berarti memperlambat pertumbuhan ekonomi. Investasi juga merupakan pengeluaran biaya atau anggaran yang diperlukan oleh industri untuk membayar peralatan aktiva dan peralatan produk guna meningkatkan kapasitas bahan dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2010). Nasari (2014) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi untuk belanja publik, agar belanja lebih efisien, seperti menciptakan lapangan kerja dan menambah pelayanan publik seperti membangun rumah sakit dan sekolah. Belanja modal yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat berdampak pada peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) dan akan membantu meningkatkan perekonomian.

Terlihat pada Gambar 1.4 data menunjukkan realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Adapun pada tahun 2017 total realisasi investasi sebesar 11.485,12 miliar rupiah dan mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 11.546,19

miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 10.211,78 miliar rupiah. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 12.541,23 miliar rupiah dan pada tahun 2021 realisasi investasi meningkat menjadi 16.699,73 miliar rupiah.

Gambar 1.4 Realisasi Investasi di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)



Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan

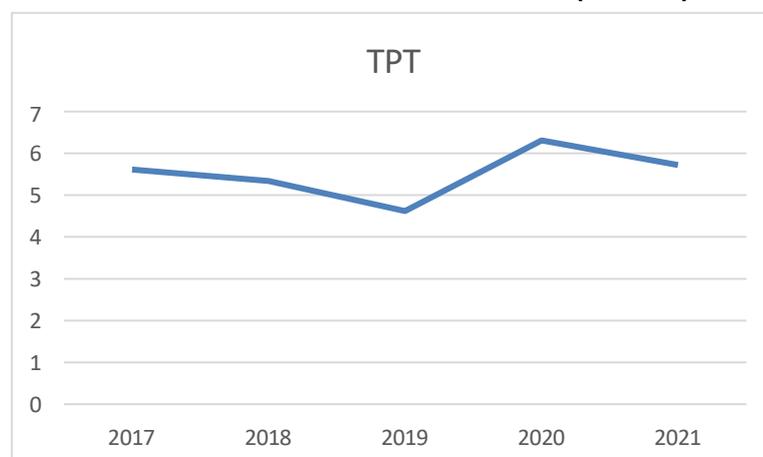
Selain PDRB, IPM, dan investasi, pengangguran merupakan indikator lain yang mempengaruhi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), tingkat pengangguran diartikan sebagai perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah seluruh pekerja, dan pengangguran sendiri mengacu pada mereka yang tidak bekerja. Pengangguran memiliki pengertian perkumpulan yang sedang mencari pekerjaan, atau orang yang sedang bersiap untuk berbisnis, atau yang kesulitan mencari pekerjaan baru, atau sudah bekerja tetapi belum memulai (Padli, 2021). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan angka yang menunjukkan jumlah pengangguran per 100 penduduk dalam klasifikasi angkatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2021).

Perekonomian suatu negara atau wilayah sedang mengalami perkembangan yang terlihat dari tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut. Selain itu, dengan adanya tingkat pengangguran juga dapat dilihat adanya kesenjangan atau

kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diterima atau diperoleh suatu masyarakat suatu negara atau wilayah. Pengangguran dapat terjadi akibat tingginya laju perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya kesempatan kerja yang luas dan serapan tenaga kerja yang persentasenya cenderung kecil, hal ini disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja. tenaga kerja yang siap bekerja. Pengangguran mempunyai hubungan yang erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Seperti yang terlihat pada gambar 1.5 berdasarkan BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 TPT ada sebanyak 186.291 jiwa dengan TPT sebesar 4,80 persen namun kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 213.695 jiwa dengan TPT sebesar 5,61 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 213.105 jiwa dengan TPT sebesar 5,34 persen. Tahun 2019 terus mengalami penurunan berjumlah 200.304 jiwa dengan TPT 4,97 persen. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penambahan sebanyak 269.817 jiwa dengan TPT sebesar 6,31 persen. Dan terus mengalami peningkatan di tahun 2021 sebanyak 252.349 jiwa atau 5,72 persen.

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh determinan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan yang tepat dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan dalam penelitian ini mengenai pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia (IPM), investasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara khusus penelitian ini akan membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan ?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan ?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi ?
4. Bagaimana pengaruh TPT terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan ?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Mengetahui pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Mengetahui pengaruh TPT terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam merumuskan arah atau kebijakan terkait kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat dijadikan program pembangunan yang lebih baik.
2. Menjadi referensi tambahan, bahan, pedoman dan juga sebagai penyempurnaan penelitian ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai perhatian terhadap penelitian yang sama.
3. Bagi penulis atau peneliti, penelitian ini merupakan pelaksanaan tugas akhir yaitu melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan rendahnya pendapatan seseorang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti pangan, papan dan sandang secara layak. Kemiskinan adalah ketidakmampuan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2016). Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam teori kemiskinan, terdapat dua paradigma besar yang mempengaruhi pengertian kemiskinan dan pengentasan kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah paradigma Neo-Liberal dan Sosial-Demokrat, yaitu:

a. Paradigma Neo-Liberal

Paradigma neo-liberal menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan individu. Dalam paradigma ini, kemiskinan dapat diatasi jika kekuatan pasar diperluas dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan (Syahyuti, 2006). Pendekatan ini merupakan strategi pengentasan kemiskinan yang bersifat sementara dan peran negara sangat minim. Paradigma neo-liberal ini didorong oleh bank dunia dan menjadi pendekatan yang digunakan di hampir semua studi mengenai kemiskinan. Teori modernisasi yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan produksi menjadi landasan teori paradigma ini (Soeharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP).

Satterthwaite (1997) mengatakan kelemahan paradigma ini adalah memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan tidak melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan. Bentuk-

bentuk kemiskinan yang muncul di masyarakat kurang mendapat perhatian. Paradigma ini tidak dapat menangkap khususnya bentuk-bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Sehingga akar penyebab kemiskinan tidak dapat ditemukan, namun pendekatan terhadap kemiskinan pendapatan ini lebih mudah dilihat dan dipelajari. karena dapat diukur secara langsung, dan target perbaikan pada tingkat individu dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

b. Paradigma Demokrat – Sosial

Dalam paradigma sosial demokrasi dijelaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural (Cheyne, O'Brien dan Belgrave, 1998). Dalam pendekatan ini kemiskinan terjadi karena tertutupnya akses bagi kelompok. Pendekatan ini juga menekankan kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemerdekaan dan kebebasan (Syahyuti, 2006). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang mempunyai atau mampu menjangkau sumber-sumber potensi yang dimilikinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik, dan pendapatan yang cukup. Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting, terutama dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan. Untuk pendekatan ini, kemiskinan harus ditangani secara institusional.

Kelemahan paradigma ini adalah tingginya ketergantungan terhadap negara dalam membentuk struktur dan institusi penanggulangan kemiskinan. Meski begitu, keberhasilan pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri bergantung pada kemampuan masyarakat miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih sulit dalam membentuk standar kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat miskin. Sebab, kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimum yang harus dicapai, melainkan dari rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhannya. Namun pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan, yaitu pada

struktur dan institusi yang menutup akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat.

Menurut salah satu bentuk kemiskinan yang dipandang sebagai masalah multidimensi, ada empat bentuk kemiskinan. Keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi standar pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak digunakan sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang disebut miskin.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif mengacu pada suatu bentuk kemiskinan yang terjadi karena dampak kebijakan pembangunan belum memberikan manfaat bagi semua sektor masyarakat, sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan atau standar kesejahteraan yang tidak merata. Daerah yang tidak tercakup dalam rencana pembangunan sering disebut sebagai daerah miskin.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan budaya (kultural) adalah suatu bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari sikap dan kebiasaan individu atau sosial, seringkali berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau meningkatkan taraf hidup melalui prosedur modern. Kebiasaan seperti ini bisa bermanifestasi sebagai rasa malas, boros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif bergantung pada orang lain.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah suatu bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh buruknya akses terhadap sumber daya, yang seringkali terjadi dalam lingkungan sosiokultural atau sosiopolitik yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini terkadang mempunyai komponen yang diskriminatif.

Setelah mengetahui bentuk-bentuk kemiskinan, maka perlu diketahui juga jenis-jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

a. Kemiskinan Alami

Kemiskinan alami adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kelangkaan sumber daya alam, sedikit atau tidak adanya infrastruktur publik (jalan, listrik, dan air bersih), dan kondisi tanah yang buruk. Daerah dengan ciri-ciri tersebut umumnya merupakan daerah yang tidak terjangkau oleh kebijakan pembangunan dan menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan dimana masyarakat tidak mempunyai banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, fasilitas dan fasilitas ekonomi secara setara. Kemiskinan ini merupakan dampak negatif dari konsep pembangunan (developmentalism) yang berlaku di negara-negara berkembang. Pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan distribusi hasil pembangunan tidak seimbang, dimana sektor industri lebih diuntungkan dibandingkan sektor pertanian.

Bentuk-bentuk kemiskinan yang diuraikan di atas seringkali dikaitkan dengan konsep pembangunan yang telah lama dipraktikkan di negara-negara berkembang pada tahun 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004). Hingga saat ini, kemiskinan masih

menjadi isu kontroversial di dunia akademis dan pengambilan kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004). Salah satu perdebatan yang dibahas adalah penentuan definisi individu atau kelompok yang masuk dalam kategori miskin. Secara umum, identifikasi kemiskinan hanya didasarkan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran konsumsi rata-rata.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kuncoro (2001) menilai pendekatan pembangunan klasik diartikan dengan mempertimbangkan perkembangan PDRB suatu provinsi, daerah atau kota. Produk domestik bruto regional (PDRB) merupakan indikator penting yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah atau negara dalam jangka waktu tertentu (Sukirno, 2011).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB sebagai nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai status perekonomian suatu daerah. PDRB diperoleh dengan menghitung total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi di suatu wilayah (Sasana dalam Syahrullah, 2014).

Sadono Sukirno (2004) terdapat tiga pendekatan dalam menghitung produk domestik bruto (PDRB), yaitu:

1. Pendekatan produksi, dihitung atas barang dan jasa yang dihasilkan pada produksi di suatu wilayah
2. Pendekatan pendapatan, dihitung dari hasil pendapatan yang diterima dari faktor produksi dan ikut dalam proses produksi di suatu wilayah.
3. Pendekatan pengeluaran, dihitung dari hasil semua pengeluaran, yaitu:

konsumsi rumah tangga, lembaga swasta dan ekspor neto.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah pada suatu produk tertentu. PDRB terdiri dari dua cara penyajian, yaitu:

1. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, bertujuan untuk memahami struktur perekonomian.
2. PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar dan dirancang untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi penyumbang utama kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Kuncoro (2006), Indeks Pembangunan Manusia berguna untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia antar negara dan wilayah. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu daerah mempunyai akses terhadap hasil pembangunan sebagai bagian dari haknya untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain (Kuncoro 2010). Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan suatu negara menjadi negara maju, berkembang, atau terbelakang. Selain itu, indeks juga menjadi parameter untuk mengukur pengaruh kebijakan perekonomian suatu negara terhadap kualitas nasionalnya, dan juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur dan membagi sub-negara (wilayah/sektor).

Dalam menghitung IPM digunakan tiga metode indeks, dimana indeks mempunyai arti yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Dimana indeks kesehatan diukur dengan menggunakan angka harapan hidup minimal dan maksimal saat lahir. Indeks pengetahuan diukur dengan menggabungkan indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Selain itu, DLI diukur dengan menggunakan indikator daya beli masyarakat (dalam pengeluaran per kapita) untuk beberapa kebutuhan dasar sebagai ukuran pendapatan yang mewakili capaian pembangunan dalam kehidupan yang layak. Nilai IPM menunjukkan sejauh mana suatu daerah mencapai tujuan tertentu, yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tingkat pengeluaran dan konsumsi untuk mencapai taraf hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu daerah dengan angka 100, maka semakin dekat pula jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Jika IPM dilengkapi dengan database dan dihitung dengan benar hingga wilayah terkecil tanpa membedakan wilayah miskin atau tidak membedakan wilayah miskin, maka peranan IPM sebagai alat ukur pembangunan akan semakin terlihat jelas, sehingga diharapkan nilai IPM sebagai alat ukur pembangunan akan semakin jelas. Tolak ukur pembangunan dapat mencerminkan situasi kemiskinan sosial yang sebenarnya.

2.1.4 Investasi

Menurut Sukirno (2008), investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran yang dilakukan oleh investor atau perusahaan untuk membeli barang modal dan peralatan guna meningkatkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, setiap daerah memerlukan investasi karena pembentukan modal meningkatkan kapasitas produktif, meningkatkan

pendapatan, dan menciptakan lapangan kerja sehingga memperluas kesempatan kerja (Todaro, 2000). (Darsana, 2016) mengatakan investasi dan lapangan kerja mempunyai hubungan yang erat terhadap peningkatan kegiatan produksi, dimana jika masyarakat yang terserap pada tenaga kerja mereka akan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, yang melakukan usahanya dalam satu negara Republik Indonesia. Bentuk penanaman modal secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) jenis penanaman modal yang bersumber dari dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sedangkan penanaman modal asing (PMA) jenis penanaman modal yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang bergabung dengan modal dalam negeri.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan penanaman modal dalam negeri merupakan bentuk kegiatan usaha dari penanaman yang bersumber dari modal dalam negeri seperti pemerintah Indonesia, badan usaha masyarakat Indonesia dan perseorangan warga Indonesia baik yang berbentuk hukum maupun tidak berbentuk hukum untuk melakukan kegiatan usaha di negara Indonesia.

Dewi & Meydianawathi (2017) mengatakan secara umum terdapat beberapa faktor dalam mempengaruhi penanaman modal dalam negeri (PMDN), yakni:

1. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam berpengaruh terhadap tingkat penanaman modal dalam negeri. Potensi yang dimaksud meliputi sektor pariwisata,

sektor perdagangan dan pengolahan barang dan jasa.

2. Biaya Investasi

Tingkat suku bunga merupakan acuan bagi para penanam modal dalam melakukan kegiatan usaha. Dimana jika tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi minat penanam modal dalam berinvestasi.

b. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan penanaman modal asing merupakan bentuk usaha kegiatan penanaman modal dari pihak asing seperti pemerintah asing, badan usaha asing dan perseorangan warga negara asing. Baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri dalam melakukan kegiatan usaha penanaman di negara Indonesia.

Penanam Modal Asing (PMA) merupakan upaya menambah jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri (Suryatno, 2003), menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:

- a. Investasi portopolio (*portopolio investment*), yaitu investasi yang hanya melibatkan aset keuangan, seperti obligasi dan saham, yang didominasi atau dinilai dalam mata uang nasional. Kegiatan investasi portofolio atau keuangan ini biasanya dilakukan melalui lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan lain sebagainya.
- b. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*), adalah PMA yang mencakup penanaman modal pada aset berwujud berupa pembangunan pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi dan lain sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing langsung dapat dianggap sebagai sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem perekonomian

terbuka pada umumnya memerlukan penanaman modal asing, terutama perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk tujuan ekspor.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka atau pengangguran umum mengacu pada penduduk usia kerja yang tidak bekerja namun sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka adalah sebagian angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan (termasuk mereka yang belum pernah bekerja atau sudah bekerja), atau mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk berwirausaha, yaitu mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan. karena alasan mereka sendiri. Mereka yang merasa tidak mampu mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum memulainya. Tingkat pengangguran adalah jumlah pekerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran pada kategori angkatan kerja. Pengangguran terbuka didasarkan pada anggapan bahwa seluruh angkatan kerja sedang mencari pekerjaan, baik yang baru pertama kali mencari pekerjaan maupun yang sedang bekerja. Sedangkan pekerja yang tergolong setengah menganggur adalah mereka yang masih mencari pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu dan mereka yang bekerja dengan jam kerja pendek (kurang dari sepertiga jam kerja normalnya, atau kurang dari 35 jam per minggu). Mereka yang masih bersedia mengambil pekerjaan, dan mereka yang tidak sedang mencari pekerjaan tetapi bersedia mengambil pekerjaan.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan PDRB dengan Kemiskinan

Menurut Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang kuat karena kemiskinan cenderung meningkat pada awal proses pembangunan dan ketika menjelang tahap akhir pembangunan, jumlah penduduk miskin berangsur-angsur berkurang. Sedangkan menurut Hermanto S. dan Dwi W (2008) mengantakan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. PDRB merupakan indikator penting yang berfungsi untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu daerah baik dalam bentuk penyajian harga konstan dan harga berlaku. Angka PDRB yang lebih tinggi diharapkan dapat menurunkan persentase kemiskinan di wilayah tersebut.

2.2.2 Hubungan IPM dengan Kemiskinan

Menurut Todaro (2003) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan manusia memegang peranan penting dalam membentuk kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kemampuannya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga dimensi penting pembangunan, yaitu pemenuhan kebutuhan hidup panjang umur dan sehat, akses terhadap pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang sesuai. Kehidupan. Artinya, tiga dimensi penting pembangunan manusia sangat mempengaruhi kemiskinan (Napitupulu, 2007).

Menurut Arsyad (2010) berpendapat bahwa peningkatan peluang konsumsi layanan sosial pendidikan, kesehatan dan gizi merupakan alat kebijakan penting dari keseluruhan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial di suatu daerah. Peningkatan akses terhadap pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan gizi akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Salah satu indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan sumber daya manusia adalah dengan melihat indeks pembangunan manusia suatu daerah. Semakin tinggi persentase IPM maka semakin baik pula pembangunan manusia di daerah tersebut.

2.2.3 Hubungan antara Investasi dan Kemiskinan

Investasi memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan karena investasi yang masuk ke suatu daerah akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di wilayah tersebut. Wilayah ini dapat mengurangi kemiskinan. Investasi dalam bentuk pembelian stok barang modal juga meningkatkan kapasitas produktif masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

Menurut Sadono Sukirno (2000) berpendapat bahwa kegiatan investasi memungkinkan masyarakat untuk terus meningkatkan kegiatan perekonomian dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sulistiawati (2012) menyatakan bahwa investasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Peningkatan penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui penanaman modal, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Ambarsari & Purnomo,2005).

2.2.4 Hubungan TPT dengan Kemiskinan

Pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah. Pengangguran mempunyai dampak positif terhadap kemiskinan. Ketika pengangguran meningkat, kemiskinan sosial juga meningkat. Pengangguran terjadi karena bertambahnya angkatan kerja dan tidak meratanya kesempatan kerja. Angka kemiskinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya angka pengangguran.

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang berulang di beberapa negara, khususnya negara berkembang. Pengangguran digambarkan sebagai kelompok angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Jika masalah ini tidak dikendalikan dan meningkat dari tahun ke tahun, maka hal ini dapat berdampak negatif pada suatu wilayah atau negara. Beberapa kasus pengangguran adalah kejahatan dan kemiskinan (Berliani, 2021).

2.3 Studi empiris

Bagian ini memuat penelitian-penelitian terdahulu yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun penelitian. Kajiannya adalah sebagai berikut:

Zikri Azriyansyah (2022). Dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh IPM, PDB dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2017 – 2021”. Dikatakan penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel sebagai metode analisisnya. Penelitian ini berfokus pada enam provinsi di Indonesia sebagai data cross section dan rentang waktu

tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai data time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara variabel indeks pembangunan manusia produk domestik regional bruto dan pengangguran terhadap kemiskinan. Kemudian secara parsial variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan, dan variabel produk domestik regional bruto menunjukkan hasil yang positif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan sedangkan variabel pengangguran menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Selanjutnya nilai koefisien determinasi menunjukkan 99,6.

Dio R. Mandey, dkk (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud”. Data penelitian ini menggunakan data time series periode 2004-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Sedangkan RLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Secara simultan PDRB, RLS, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Marlina R. Padambo, dkk (2021). Dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Inflasi Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dan metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan perekonomian berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Inri Jesika Bawowo, dkk (2022). "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)". Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Ridho Andykha, dkk (2018). Dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh PDB, Tingkat Pengangguran, dan IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data cross-sectional yang terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan data time series yaitu tahun 2011-2015. Alat analisis yang digunakan dalam mengestimasi model regresi data panel adalah Fixed Effect Model (FEM) atau disebut juga Least Square Dummy Variable. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

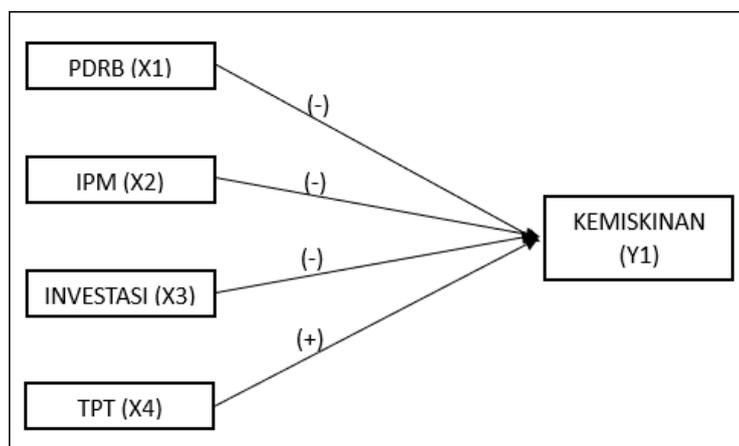
Putri Ni Putu Asri Diastar, dkk (2021). Dengan judul penelitian "Pengaruh Investasi, Dana Perimbangan dan PAD Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali". Penelitian ini menggunakan data data sekunder

berlokasi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode tahun 2011-2017 dengan menggunakan teknik analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan dana perimbangan dan PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, 2) investasi, dana perimbangan berpengaruh positif signifikan dan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, 3) Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan, sedangkan investasi dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kemiskinan.

2.4 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan pola pikir mengenai hubungan antar variabel yang akan diteliti serta menggambarkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian, teori yang digunakan, jumlah hipotesis dan teknik analisis data yang digunakan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan, belum berdasarkan fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Investasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.